

RINGKASAN

MILKA SHERLY C MAKANUAI.STUDI PELAYANAN PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (SPB) DI UPT PELABUHAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN (P2SKP) MAYANGAN PROBOLINGGO JAWA TIMUR. (dibawah bimbingan **Dr. Ir. Darmawan Ockto S, MS** dan **Ir. Agus Tumulyadi, MP.**

Setiap nelayan yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). SPB kapal perikanan yang diterbitkan oleh pihak syahbandar setelah mendapatkan Surat Laik Operasi (SLO) sebelumnya. Terbitnya SPB berarti kapal sudah dinyatakan layak untuk berlayar dan beroperasi menangkap ikan. Sebagai tindak lanjut dari UU RI No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 42, dijelaskan bahwa setiap kapal yang akan berlayar dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB). SPB tersebut dikeluarkan syahbandar dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan yang diangkat oleh Menteri sesuai Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.19 Tahun 2006.

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian dengan memberikan kuisioner. Responden yang dipilih dalam penelitian ini yaitu Agen Kapal dan Kesyahbandaran UPT. P2SKP Mayangan beserta petugas Patroli Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang dimana biasanya berkoordinasi juga dengan beberapa pihak antara lain, yaitu Satker PSDKP (Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan), Satuan Keamanan Laut (Lantamal V) TNI AL beserta Pol Air dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif yang dikaji dalam bentuk presentase dan grafik.

Penelitian ini menggunakan program software spss 17 dalam melakukan uji validitas dan realibilitas data. Skor item berkorelasi signifikan dengan skor total dapat diketahui dengan melihat table r (menggunakan dua arah dengan signifikan 0,05). Nilai r table untuk Variabel 1 dengan 30 orang responden Agen Kapal sebesar 0,361 dan nilai r table untuk Variabel 2 dengan 20 orang responden Kesyahbandaran UPT P2SKP Mayangan beserta